

**EVALUASI PENERAPAN *INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)* BIDANG
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN BIDANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI PT
SUMBERTAMA NUSA PERTIWI PROVINSI JAMBI**

Agus Trianto¹, Danang Manumono², Resna Trimerani²

¹Mahasiswa Fakultas Pertanian INSTIPER

²Dosen Fakultas Pertanian INSTIPER

Jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Instiper Yogyakarta, Jl. Nangka II,
Maguwoharjo (Ringroad Utara), Yogyakarta 55282, Indonesia
E-mail: agusinstiperyk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai penerapan prinsip *Indonesia Sustainable Palm oil* pada PT Sumbertama Nusa Pertiwi yang berada di desa Arang-arang dan Desa Parit Kecamatan, Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penerapan prinsip ke tiga dan ke enam ISPO. Batasan masalah penelitian ini meliputi prinsip ketiga ISPO terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta prinsip keenam ISPO yaitu pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dan konsultasi serta data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan berupa jurnal penelitian terdahulu artikel, peraturan presiden dan buku yang relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan Prinsip ketiga dan keenam ISPO pada PT SNP sebesar 71,43 %. Hal ini disebabkan karena dari total indikator ISPO yang terpenuhi hanya 15 Indikator sedangkan 6 indikator tidak memiliki kelengkapan dokumen, laporan dan dokumentasi sebagai bukti pendukung. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan adalah besarnya biaya untuk satu kali sertifikasi dan kurangnya pelatihan untuk auditor internal ISPO pada departemen QHSE yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai tata cara sertifikasi.

Kata Kunci : Evaluasi ISPO, Penerapan ISPO

PENDAHULUAN

Besarnya potensi ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan adanya peningkatan kebutuhan minyak nabati domestik telah berpengaruh pada pesatnya pertumbuhan area perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2019, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, perkebunan kelapa sawit diperkirakan seluas 14,68 juta hektare dan produksi kelapa sawit Indonesia tahunan sampai dengan Agustus 2019 diketahui meningkat 14% dibanding periode yang sama pada 2018. Produksi CPO pada tahun 2018 sekitar 39,59 juta ton dan meningkat sebesar 11,26% sejak Januari hingga Oktober 2019 menjadi 44,05 juta ton.¹ Selain menjadi sumber devisa terbesar, industri kelapa sawit juga membuka lapangan pekerjaan yang besar.

Konsumsi domestik pada Mei 2020 sebesar 1,38 juta ton, namun pada bulan Juni konsumsi sawit tercatat sebesar 1,33 juta ton. Kemudian di bulan September 2020 mengalami kenaikan 2% atau sebesar 1,47 juta ton dari bulan sebelumnya.² Hal tersebut membuka peluang besar minyak sawit Indonesia dan produk turunannya untuk memenuhi konsumsi minyak sawit dunia. Penjelasan diatas menunjukkan pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia. Untuk itu, seluruh pihak yang berkepentingan dalam industri ini perlu memerhatikan dan mematuhi ketentuan yang berlaku terkait CPO agar pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia semakin baik. Direktur eksekutif gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya mengenai pengelolaan perkebunan dan pengetahuan memilih bibit unggul oleh petani perlu diperbaiki. GAPKI

telah melakukan pendampingan dan peningkatan pengetahuan serta kesejahteraan petani agar produktivitas kelapa sawit semakin baik dan para petani bisa mendapat sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.³

ISPO adalah standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang secara resmi dibentuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2011 dan bersifat wajib/ *mandatory* sejak tahun 2012 karena ISPO disusun sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah Indonesia (Anwar, Sitorus, Fauzi, Widiatmaka, dan Machfud, 2016). Sertifikat ISPO diterbitkan untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit yang bersangkutan telah mematuhi standar pertanian yang berlaku. Perusahaan wajib memenuhi standar ISPO karena perusahaan yang tidak menerapkan ISPO akan mendapatkan sanksi berupa penurunan kelas kebun menjadi kelas IV kemudian dalam rentan waktu 4 bulan, perkebunan tersebut akan dikenakan peringatan 3 kali sebelum Kementerian Perkebunan mencabut izin usaha perkebunan dan perusahaan tersebut tidak diperkenankan mengekspor CPO (Panjaitan, Syahrin, Suhaidi, dan Siregar, 2014).

Penerapan ISPO di Indonesia kini menjadi perhatian khusus, baik itu oleh pemerintah maupun semua pelaku usaha komoditas kelapa sawit. Dari penjelasan mengenai pentingnya minyak kelapa sawit bagi Indonesia maka penting juga mengetahui penerapan ISPO sebagai standar keberlanjutan kebun kelapa sawit. Terdapat 7 prinsip dasar ISPO yang memuat kriteria-kriteria tertentu, yaitu prinsip Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan; Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengelolaan Kelapa Sawit;

¹ Yuniartha, Lidya. 2019. *Hingga Oktober 2019 produksi CPO Indonesia tumbuh 11,26%*. Senin, 23 Desember. Diakses Februari 2020. Kontan.co.id.

² Handoyo, 2020. *Konsumsi sawit domestik naik 2% di Oktober 2020*. Selasa, 15 Desember 2020.

Diakses Maret 2021. Industri.kontan.co.id

³ Kamaludin, Arief. 2019. *Kelapa sawit sebagai penopang perekonomian nasional*. 7 Oktober. Diakses Februari 2020. Katadata.co.id

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Tanggung jawab terhadap Pekerja; Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat; Tanggung jawab Sosial dan Ekonomi Masyarakat; dan Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan (Wigena, Sudradjat, and Siregar, 2018).

Saat ini tujuan perusahaan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan sumber daya alam dalam aktivitas utama perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pengelolaan dampak lingkungan. Kedua hal ini penting bagi suatu perusahaan untuk mewujudkan usaha yang berkelanjutan dan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Peneliti hendak melakukan penelitian pada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikat ISPO yaitu PT Sumbertama Nusa Pertiwi (SNP). PT Sumbertama Nusa Pertiwi merupakan anak perusahaan Bakrie Sumatera Plantation (BSP) yang berlokasi di Jambi. PT Sumbertama Nusa Pertiwi memiliki kapasitas olah sebanyak 30 ton TBS/jam dan berstatus penanaman modal dalam negeri (PMDN). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab PT SNP terhadap lingkungan dan sosial dengan mengacu pada prinsip ISPO ketiga yaitu Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta prinsip ISPO keenam terkait tanggung jawab sosial dan ekonomi Masyarakat.

PT SNP sudah memiliki sertifikat ISPO sejak tahun 2014 sehingga peneliti hendak melakukan evaluasi penerapan ISPO berdasarkan indikator prinsip ISPO ketiga dan keenam. Penerapan prinsip ISPO oleh PT Sumbertama Nusa Pertiwi diperkirakan memiliki tantangan atau kendala yang dihadapi perusahaan khususnya terkait tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala perusahaan dalam mematuhi standar ISPO.

Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana teori dibangun berdasarkan data. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang penyajian dan analisis data dilakukan secara naratif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, ide, fakta dan karakteristiknya berlatar belakang alami/ kenyataan dalam masyarakat dan lingkungan serta tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo, Basuki, 2006:24 dalam Prabowo, Heriyanto, 2013).

Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Sumbertama Nusa Pertiwi yang merupakan anak usaha dari Bakri Sumatra Plantation. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Aktivitas bisnis perusahaan ini berada di Kabupaten. Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan tersebar di dua Desa yaitu: Desa Arang-Arang, Kec. Kumpeh Ulu dan Desa Parit, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 April 2021.

Metode Penentuan Sampel

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel sehingga penelitian lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Sampel merupakan sebagian objek dari keseluruhan populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh objek penelitian (Notoatmojo, 2003). Teknik sampling menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yaitu adanya keterkaitan dan kephahaman responden terhadap ISPO. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Sumbertama Nusa Pertiwi dan masyarakat sekitar. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai yaitu petinggi kebun, departemen QHSE, Asisten Kebun, Mandor dan Masyarakat Sekitar.

Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara, observasi lapangan dan konsultasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari verifikasi studi kepustakaan pada jurnal penelitian terdahulu.

Konseptualisasi dan Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian ini berupa alat tulis, *check list Indonesian* persyaratan *Sustainability Palm Oil*, laptop, dan perlengkapan lainnya. Data hasil penilaian yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan dibandingkan dengan indikator ISPO yang ditetapkan dalam Permentan No.19 Tahun 2011 terkait tanggung jawab PT Sumbertama Nusa Pertiwi terhadap sosial dan lingkungan. Penentuan nilai kesesuaian dilakukan dengan menjumlahkan indikator dari prinsip ISPO ketiga dan keenam yang sesuai dengan indikator ISPO lalu dibagi dengan total keseluruhan indikator prinsip ISPO ketiga dan keenam. Pengukuran indikator prinsip ISPO ketiga dan keenam menggunakan Skala Guttman yaitu skala dengan pilihan jawaban yang tegas (Ya/Tidak). Peneliti selanjutnya menggali informasi lebih mendalam untuk mengetahui setiap alasan dari jawaban responden. Berikut ini indikator prinsip ISPO ketiga dan keenam:

a. Prinsip dan Kriteria *Indonesia Sustainable Palm Oil* Terkait Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Prinsip ini memuat total 16 indikator penelitian, yaitu:

1. Memiliki dokumen AMDAL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan > 3.000 ha.
2. Memiliki dokumen UKL/UPL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa

sawit yang mengelola lahan seluas < 3.000 ha.

3. Tersedia rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil AMDAL, UKL/UPL termasuk laporan kepada instansi yang berwenang
 4. Tidak tersedia Standar Operasional Perusahaan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 5. Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan
 6. Tersedia tim khusus yang mampu mencegah dan menangani kebakaran
 7. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat
 8. Tersedia rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pelaporannya
 9. Tersedia identifikasi perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan seperti buffer zone, pembuatan papan peringatan dan pembuatan poster
 10. Memiliki data flora dan fauna di kebun dan sekitaran kebun, sebelum dan sesudah di mulainya usaha perkebunan
 11. Tersedia hasil identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi
 12. Tersedia peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi
 13. Tersedia rekaman identifikasi dan sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi
 14. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai
 15. Tersedia peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai
 16. Tersedia rekaman pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi
- b. Prinsip dan Kriteria *Indonesia Sustainability Palm Oil* Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Prinsip keenam ISPO terdiri dari 5 indikator penilaian, yaitu:

1. Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat, seperti pendidikan, kesehatan, olah raga dan usaha mikro keci menengah
2. Tersedia rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan dalam bentuk program apa
3. Memiliki program untuk kesejahteraan masyarakat adat, contoh dengan cara memberi kesempatan kerja kepada masyarakat adat (penduduk asli)
4. Cara perusahaan mempertahankan kearifan lokal di daerah Perkebunan terutama di PT. SNP
5. Tersedia rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/penduduk asli dalam melaksanakan kegiatan

Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah. Pembatasan masalah akan memudahkan pembahasan berfokus pada rumusan masalah sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini berfokus pada perkebun kelapa sawit, tidak termasuk penelitian pada pabrik pengolahan kelapa sawit. Berikut indikator penilaian berdasarkan dua prinsip ISPO sebagai batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

Analisis Data dan Pembentukan Model

Model pengelolaan dan analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran sistematis,

deskripsi, faktual dan akurat tentang fakta, sifat, serta hubungan antar objek yang diteliti (Mulyana, 2008: 145 dalam Prasanti, 2018). Pengumpulan data model deskriptif didasarkan pada faktor-faktor yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian, kemudian akan dilakukan analisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010: 151 dalam Prabowo dan Heriyanto, 2013). Data yang dipergunakan adalah fakta bukan opini dan memiliki standar yang valid sebagai pembanding. Peneliti akan mengevaluasi kinerja perusahaan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta tanggung jawab sosial dan ekonomi masyarakat berdasarkan persyaratan ISPO. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi dan melakukan analisis mengenai permasalahan penerapan kedua prinsip ISPO ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari pegawai perkebunan dan masyarakat sekitar perkebunan yaitu masyarakat di Desa Arang-arang dan Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Para responden menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kapabilitasnya. Berikut rincian informasi mengenai responden penelitian ini.

Tabel 5.1 jenis kelamin di PT Sumbertama Nusa Pertiwi

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentasi (%)
Laki-laki	28	93,3
Perempuan	2	6,7
Total	30	100

Berdasarkan Tabel 5.1 Identitas responden di PT Sumbertama Nusa Pertiwi, diketahui bahwa mayoritas responden adalah Laki-laki dengan persentasi sebesar 93,3%. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pegawai pria dibanding pegawai perempuan, dan masyarakat sekitar yang ditemui kebanyakan Laki-laki. Sedangkan

responden berjenis kelamin perempuan memiliki persentasi sebesar 6,7%.

Tabel 5.2 Posisi/Jabatan di PT Sumbertama Nusa Pertiwi

No	Posisi	Jumlah (Orang)	Persentasi (%)
1	Petinggi Kebun	2	6,7
2	Asisten Kebun	9	30
3	Mandor	14	46,6
4	Masyarakat Sekitar	5	16,7
Total		30	100

Berdasarkan Tabel 5.2 mengenai jumlah responden yang paling banyak diwawancarai memiliki posisi sebagai mandor dengan persentasi sebesar 46,6% sebab banyak pertanyaan terkait prinsip ISPO dimana mandor memiliki kapabilitas untuk menjelaskannya. Total Petinggi Kebun pada PT SNP adalah 6(orang) namun karena waktu dan situasi yang memungkinkan untuk menjadi responden penelitian hanya berjumlah 2 (dua) orang dengan persentasi sebesar 6,7%.

A. Evaluasi Kinerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

PT SNP telah memiliki sertifikat *Indonesia Sustainable Palm Oil* terhitung dari tanggal 19 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 18 Juli 2021. Berikut ini adalah rincian pembahasan mengenai implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada PT Sumbertama Nusa Pertiwi.

a. Hasil Evaluasi Implementasi AMDAL dan Izin Lingkungan

Tabel 5. 3 Implementasi AMDAL dan izin lingkungan

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
----------------	------------------------------------

Memiliki dokumen AMDAL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan > 3.000 ha.	Tersedia dokumen amdal yang mengelola lahan seluas 8,829 Ha, amadal di sahkan pada tahun 2004 nomor 63 melalui keputusan gubernur Jambi
Memiliki dokumen UKL/UPL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan seluas < 3.000 ha.	Tidak memiliki dokumen UKL/UPL karena perusahaan mengelola lahan > 3000 Ha dan perusahaan telah memiliki dokumen amdal
Tersedia rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil AMDAL, UKL/UPL termasuk laporan kepada instansi yang berwenang	Tersedia rekaman berupa laporan RKL-RPL dan 1 bundel dokumen pelaksanaan amdal

Analisis dampak lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai pengaruh atau dampak yang dihasilkan dari suatu proyek/usaha pada lingkungan hidup. AMDAL dibuat pada tahap perencanaan suatu usaha yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa perusahaan memiliki dokumen amdal dengan Hak Guna Usaha 8,829 Ha dan kapasitas pabrik 30 ton TBS/Jam. Kerangka AMDAL mengacu pada Keputusan Gubernur Jambi No. 63 Tahun 2004 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan

Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit PT Sumbertama Nusa Pertiwi di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Karena perusahaan mengelola lahan > 3000 ha, maka perusahaan diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu pengembangan proyek perkebunan kelapa sawit.

b. Hasil Evaluasi Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Tabel 5. 4 Implementasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
Tersedia Standar Perusahaan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran	Tersedia Standar Operasional Perusahaan (SOP), berdasarkan informasi dokumen tidak ditunjukkan
Tersedia tim yang mampu mencegah kebakaran	Ada tim khusus dinamakan BAKORTIBA
Tersedia sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Tersedia sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran
Memiliki sistem tanggap darurat	Terdapat struktur organisasi yang diketuai oleh Pak Fahmi
Tersedia rekaman pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan dokumentasi	Tidak memiliki rekaman pelaksanaan

SOP merupakan hal penting yang menjadi acuan perusahaan dalam bertindak agar mampu bekerja secara optimal mengatasi bencana kebakaran. Menyadari pentingnya penanganan kebakaran, maka PT SNP membentuk

satu tim khusus yang dinamakan BAKORTIBA pada tahun 2016, Berdasarkan informasi lengkap akan tetapi dalam bentuk dokumen Standar Operasional Prosedur di PT SNP tidak ada dokumen. Tim BAKORTIBA beranggotakan total 29 orang yang kemudian diketuai oleh Pak Fahmi, dibagi menjadi 2 tim utama yaitu Tim A dan Tim B. PT SNP bekerjasama dengan PT Telkomsel untuk mendeteksi titik panas api, yang dapat diketahui melalui satelit luar angkasa. Alat yang terhubung dengan satelit tersebut dioperasikan di kantor PT SNP dan akan berbunyi ditandai warna merah pada bagian lahan perusahaan yang mengalami kebakaran. Selain itu, PT SNP juga memiliki menara untuk memantau kondisi terkini lahan dan dapat dimanfaatkan untuk melihat apabila terjadi kepulan asap akibat kebakaran. Sarana/prasarana lain yang tersedia adalah tersedianya mobil damkar, mobil tangki air, dan akses jalan yang dapat menjangkau setiap titik lahan perusahaan. Rekaman pelaksanaan penanganan kebakaran hanya berupa foto, tidak terdapat rekaman yang lengkap seperti laporan pertanggung jawaban dan rincian dokumen pelaksanaannya.

c. Hasil Evaluasi Implementasi Pelestarian Biodiversity

Tabel 5. 5 implementasi pelestarian biodiversity

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
Tersedia identifikasi perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan seperti buffer zone, pembuatan papan peringatan dan pembuatan poster	Tersedia papan peringatan dan ditangani langsung oleh departemen QHSE

Memiliki data flora dan fauna di kebun dan sekitaran kebun, sebelum dan sesudah di mulainya usaha perkebunan	Tersedia data baik sesudah adanya PT SNP dan sebelum adanya PT SNP
--	--

Keanekaragaman hayati (biodiversity) baik itu flora maupun fauna merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi sehingga harus dilestarikan untuk menghindari kepunahan. PT SNP selaku pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan kekayaan alam wajib memberikan perlindungan secara optimal pada flora dan fauna sebagai bentuk perwujudan pelestarian biodiversity. Pada PT SNP, terdapat Departemen Quality Health Safety Environment (QHSE) yang secara langsung menangani masalah perlindungan flora dan fauna. Perusahaan memiliki data berupa identifikasi jenis-jenis biodiversity sekitaran kebun yang ada sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. Hasil identifikasi satwa dan vegetasi kemudian akan menjadi dasar pengelolaan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan/identifikasi rutin dan rinci yang akan dilakukan oleh tim internal PT SNP. Beberapa cara perlindungan biodiversity yang diterapkan PT SNP, yaitu terpasang papan peringatan dilarang berburu satwa dan unggas pada areal tertentu, serta tersedia *buffer zone* yaitu kawasan yang tidak dibangun dan dibiarkan sebagaimana aslinya seperti hutan, rawa, dan semak belukar.

d. Hasil Evaluasi Implementasi Perlindungan Kawasan yang Mempunyai Nilai Konservasi Tinggi

Tabel 5. 6 Evaluasi implementasi perlindungan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
Tersedia hasil identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi	Tersedia dengan luasan 2,87 ha
Tersedia peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi	Tersedia dalam bentuk peta sebaran NKT
Tersedia rekaman identifikasi dan sosialisasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi	Tersedia rekaman identifikasi yang dilakukan oleh CV.Afi Erfolg pada tahun 2014

Kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT) merupakan suatu areal mencakup ekosistem hutan dan non hutan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan nilai serta fungsi-fungsi konservasi. Pada tahun 2014, PT SNP telah melakukan identifikasi kawasan NKT yang dilaksanakan oleh CV.Afi Erfolg dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan Scoping Study: Penilaian Nilai Konservasi Tinggi. Tersedia peta kebun yang menunjukkan berbagai titik kawasan yang memiliki NKT dengan total areal seluas 2,87 ha. CV Afi Erfolg adalah badan usaha independen yang memberikan jasa konsultan dan audit, dalam hal ini menjadi lembaga independen yang menilai areal yang seharusnya menjadi kawasan konservasi. Tim QHSE bersama CV Afi Erfolg melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membentuk Forum Group Discussion

(FGD) yang membahas tentang rincian lokasi kawasan yang memiliki NKT, serta bagaimana pengelolaan dan pemantauan kawasan ini. Pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, seperti perusakan dan penebangan pohon tanpa ijin akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran.

e. Hasil Evaluasi Implementasi Konservasi Kawasan dengan Potensi Erosi Tinggi

Tabel 5. 7 evaluasi implementasi konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai	Tersedia SOP terkait hal ini
Tersedia peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai	Tersedia dalam bentuk peta sebaran sungai dan topografi yang relative cekung
Tersedia rekaman pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi	Tidak tersedia rekaman pelaksanaan kawasan dengan potensi erosi tinggi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait kawasan konservasi termasuk kawasan sempadan sungai, narasumber menjelaskan bahwa Tim NKT dan pengenal lokasi sudah melakukan survey mengelilingi HGU PT SNP, setiap sungai alami ditetapkan sempadannya sebagai area konservasi. Dalam areal perkebunan PT SNP terdapat satu sungai yang bernama sungai Puding, dimana air dari sungai

ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan *water* manajemen. Luas sempadan sungai ini sudah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai area konservasi PT SNP.

Tersedia SOP kawasan konservasi dan sempadan sungai seperti pembuatan tanda-tanda berupa patok penandaan daerah sempadan sungai yang terbuat dari kayu. Selain itu, tersedia pula peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai yang relative cekung. Sudah menjadi komitmen perusahaan PT SNP untuk ikut menjaga sempadan sungai dengan tidak menanam pokok sawit di bibir sungai sebagai bagian sertifikasi ISPO dan RSPO. Komitmen PT SNP diwujudkan dalam pemantauan kualitas air permukaan dan sungai yang ada dan dilaporkan secara rutin penetapan area konservasi ini juga menjadi bagian dari pencegahan tercemarnya sungai. Tidak tersedia rekaman pelaksanaan kawasan dengan potensi erosi tinggi karena sungai Puding dikategorikan sebagai anak sungai dan terdapat hutan penyangga di sempadan sungai yang mengurangi bahaya erosi. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dari implementasi pelaksanaan konservasi kawasan karena tidak terdapat bukti dokumentasi yang memadai.

Kendala lain yang dihadapi perusahaan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah ketidaklengkapan dokumen pelaksanaan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena keterbatasan SDM, dimana Departemen QHSE yang menangani ini hanya terdiri dari 5 orang karyawan dan memiliki tugas yang banyak. Permasalahan lain adalah perusahaan tidak menanggung biaya pelatihan auditor ISPO.

B. Prinsip ISPO Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada PT Sumbertama Nusa Pertiwi, maka berikut ini data yang diperoleh mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan ekonomi masyarakat:

a. Hasil Evaluasi Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kemasyarakatan

Tabel 5.8 evaluasi implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga dan usaha mikro kecil menengah	Tersedia program CSR dalam bentuk pendidikan olahraga, keagamaan, lingkungan dan infrastruktur
Tersedia rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan dalam bentuk program apa	Tersedia, rekaman realisasi yang sering dilaksanakan oleh PT SNP yaitu dalam bentuk infrastruktur perbaikan jalan

Corporate Social Responsibility perusahaan yang telah dilaksanakan bertujuan dalam rangka upaya terciptanya kemandirian masyarakat disekitar tempat usaha yang berdampak kepada pencapaian kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri, dan tentunya upaya untuk pencapaian tersebut dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dan

peningkatan-peningkatan dari program yang dilaksanakan. Bentuk CSR yang diberikan PT SNP terkait pendidikan perusahaan memberikan bantuan gaji berserta tunjangan kepada yayasan nusa cerdas pertiwi Bakrie, di bidang olahraga PT SNP memberikan bantuan pembuatan lapangan bola voli berserta alat-alat olahraga karang taruna Desa Parit Kec Sungai Gelam. Di bidang lingkungan terdapat bantuan dana partisipasi perusahaan dalam rangka melaksanakan HUT SATPAM ke-39 di POLRES Muaro Jambi, Di bidang Infrastruktur terdapat bantuan pemeliharaan/pemeliharaan jalan desa Parit Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi dari bulan Januari s/d Desember 2020.

b. Hasil Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Adat/Penduduk asli

Tabel 5.9 Evaluasi implementasi pemberdayaan masyarakat adat/penduduk asli

Indikator ISPO	Kondisi PT Sumbertama Nusa Pertiwi
Memiliki program untuk kesejahteraan masyarakat adat, contoh dengan cara memberi kesempatan kerja kepada masyarakat adat (penduduk asli)?	PT SNP memberikan peluang kerja di perkebunan untuk masyarakat adat
Cara perusahaan mempertahankan kearifan lokal di daerah Perkebunan terutama di PT. SNP	Perusahaan selalu berpartisipasi dalam segala bentuk acara adat guna melestarikan warisan nenek moyang
Tersedia rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/penduduk asli dalam melaksanakan kegiatan	Tidak tersedia rekaman pelaksana

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Arang-arang dan Desa Parit yang merupakan daerah sekitar PT SNP adalah 4.467 jiwa dan 1.172 KK, dengan total luas wilayah 772 km. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.183 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 2.284 jiwa. Mata pencaharian masyarakat di desa sekitar PT SNP adalah sebagai petani, buruh atau karyawan, nelayan, pedagang, PNS dan bengkel, mayoritas penduduk di desa arang-arang berkerja sebagai karyawan perusahaan PT SNP, sedangkan mayoritas masyarakat desa parit bermata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya petani desa parit menanam karet dan sawit, mereka jarang sekali menanam sayuran dan tidak menanam padi. Sedangkan petani desa arang-arang lebih mengandalkan pendapatan dari buah duku dan durian serta tanaman sayuran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Dari 21 indikator terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta tanggung jawab sosial ekonomi masyarakat yang terpenuhi hanya 15 indikator sedangkan 6 indikator lainnya tidak memiliki kelengkapan bukti dokumen dan rekaman realisasi yang jelas, sehingga persentasi tingkat keberhasilan PT Sumbertama Nusa Pertiwi dalam memenuhi prinsip ISPO ini sebesar 71,43 % maka masuk ke dalam golongan hijau/kelas II.
2. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah ketidaklengkapan dokumen pelaksanaan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena keterbatasan SDM, dimana Departemen QHSE yang menangani ini hanya terdiri dari 5 orang karyawan dan memiliki tugas yang banyak.
3. Terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT SNP supaya dapat di

perhatikan lebih untuk melindungi areal konservasi termasuk flora dan fauna.

Saran :

1. Perusahaan perlu melakukan pembagian tugas yang spesifik dengan keterbatasan SDM Departemen QHSE yang dimiliki, dimana ada yang bertanggung jawab untuk melengkapi semua dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT SNP.
2. Solusi terkait keterbatasan SDM di departemen QHSE yang membuat beberapa lapora terkait dokumen tidak lengkap, yaitu Penambahan SDM di departemen QHSE untuk meminimalkan biaya oprasional dibanding membuat departemen baru.
3. Untuk program CSR, peneliti memberikan rekomendasi berupa pembentukan divisi khusus yang menangani publikasi ke media sosial atau web perusahaan dan dokumentasi baik itu foto maupun rekaman setiap kegiatan CSR yang dilakukan PT Sumbertama Nusa Pertiwi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sitorus, Fauzi, Widiatmaka, dan Machfud. 2016. "Pencapaian Standar ISPO Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur" 22 (March): 11–18.
- Dharmawan, Nasdian, Barus, Kinseng, dan Roslinawati.2019. "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 1, No. 2 (2017): 304-315
- Fachrudin, Nearti, dan Awailah. 2020. "Analisis Penerapan GAP (Good Agriculture Pactice) dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT Duta Reka Mandiri." *Jurnal Agripta* Vol. 4, no.2 (Oktober): 2020 43-50.
- Fuadah, dan Ernah. 2018. "Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan Prinsip ISPO di PTPN VIII Cisungka, Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Pertanian (JIP)*, Desember 2018 vol. 23 (3) 190-195.

Nanggara, Rosalina, Kartika, dan Setyawan. 2017. "Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan (Ernah 2018)Ekosistem, Kebakaran Hutan dan Lahan." *Forest Watch Indonesia* (Maret): 2017.

Panjaitan, Syahrin, Suhaidi, dan Siregar. 2014. "Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia." *USU Law Jurnal* 2 No. 2 (September): 43–61.

Septiawan, Haryadi, dan Tohari. 2018. "Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Batu Ampar PT Smart TBK dalam Implementasi Indonesia Sustainebel Palm Oil." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 4 No. 2 (Desember 2014): 136-144 .